



EDISI SELASA 21 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

Rumah Meledak di Grand Polonia, 7 Bangunan Terdampak

Ledakan mengguncang sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (20/7) sore. Dampak ledakan menyebabkan satu rumah hancur dan sedikitnya tujuh rumah di sekitarnya mengalami kerusakan akibat serpihan bangunan. Sejumlah kendaraan yang berada di lokasi juga rusak parah. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak mengatakan hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kebocoran pipa gas bawah tanah. Menurutnya, indikasi tersebut diketahui berdasarkan alat pendeteksi yang digunakan petugas di lokasi. Hingga Senin malam, proses evakuasi dan penyelidikan masih terus dilakukan. (ist.dok)

BAK ESTAFET KORUPSI BUPATI: TERKINI KPK OTT DI LOMBOK BARAT



Penangkapan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/7/2026) kembali menambah daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Sepanjang 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap 11 kepala daerah. Sementara sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sedikitnya 16 kepala daerah telah ditangkap dalam perkara rasuah, pemerasan, hingga suap jabatan. Sebelumnya, KPK menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada Jumat (17/7/2026) dalam perkara dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Penindakan terhadap Etik yang kemudian disusul OTT terhadap Bupati Lombok Barat tiga hari berselang, memperpanjang deretan kepala daerah yang berhadapan dengan proses hukum. Sorotan terhadap persoalan tata kelola pemerintahan dan pengawasan terhadap penyelenggara negara di daerah menguat. Tak berlebihan jika kondisi ini dipandang sebagai estafet korupsi yang terus berulang. BACA HAL 11...



Abdul Azis

- **Jabatan:** Bupati Kolaka Timur
- **Waktu OTT:** Agustus 2025
- **Dugaan perkara:** Suap proyek pembangunan Gedung RSUD Kelas C Kolaka Timur.



Sugiri Sancoko

- **Jabatan:** Bupati Ponorogo
- **Waktu OTT:** November 2025
- **Dugaan perkara:** Suap jabatan Direktur RSUD dan pengaturan paket proyek di lingkungan Pemkab.



Ardito Wijaya

- **Jabatan:** Bupati Lampung Tengah
- **Waktu OTT:** Desember 2025
- **Dugaan perkara:** Permintaan commitment fee (ijon pengadaan barang dan jasa) sebesar 15-20%.



Ade Kuswara Kunang

- **Jabatan:** Bupati Bekasi
- **Waktu OTT:** Desember 2025
- **Dugaan perkara:** Suap ijon paket pekerjaan anggaran daerah TA 2025 senilai miliaran rupiah.

**DAFTAR
KEPALA DAERAH
TERJARING
OTT KPK**

Lanjutan di Hal 11...

Modus Under Invoicing Ekspor Sawit

PRABOWO: DARI RI DIJUAL RP14 RIBU, SAMPAI EROPA RP27 RIBU

Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga transaksi sebenarnya masih terjadi pada industri kelapa sawit Indonesia. Menurutnya, praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi devisa dalam jumlah besar karena selisih harga justru dinikmati pihak tertentu.



Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Dok.Setpres)

Hal itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Prabowo menjelaskan, harga kelapa sawit atau minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang tercantum dalam kontrak ekspor dari Indonesia umumnya berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Padahal, harga komoditas yang sama di pasar internasional, termasuk di Rotterdam, Eropa, dapat mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.

"Kelapa sawit itu di kita, harganya Rp15 ribu per kg ya, di harga internasional Rp27 ribu. Kita Rp14 ribu-Rp15 ribu, siapa yang nikmati Rp13 ribunya? Hampir 50 persen. Jadi permainan inilah yang menusuk hati kita," ujar Prabowo.

Ia menilai selisih harga yang hampir mencapai 50 persen tersebut menunjukkan adanya praktik yang merugikan negara. Menurutnya, perusahaan mengekspor sawit dari Indonesia dengan harga sekitar Rp14.000 per kilogram, tetapi dalam perjalanan menuju Eropa kontraknya diduga diubah sehingga harga jualnya meningkat menjadi Rp27.000 per kilogram.

"Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp27.000. Jadi kita hilang 50 persen kekayaan kita. Satu kali perjalanan

kita hilang 50 persen kekayaan kita," katanya.

Untuk mengatasi praktik under invoicing maupun pelaporan ekspor yang tidak sesuai, Prabowo mengaku telah mengumpulkan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta tim ekonomi pemerintah di Istana Merdeka.

"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta seluruh pihak mencari solusi agar kebocoran devisa akibat praktik tersebut dapat dihentikan. Menurutnya, selama ini aliran dana dalam jumlah sangat besar justru mengalir ke luar negeri.

"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, 'jangan, Pak, jangan kita teruskan.' Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelas Prabowo.

Pemerintah kemudian memutuskan membentuk tata kelola ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Entitas tersebut dibentuk untuk menekan praktik under invoicing sekaligus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor komoditas strategis.

Prabowo mengungkapkan, berdasarkan laporan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, PT DSI yang baru beroperasi selama satu bulan dua minggu telah mengelola devisa sebesar US\$10,5 miliar, atau sekitar Rp188,265 triliun dengan asumsi kurs Rp17.930 per dolar AS.

Menurut Prabowo, sebelum PT DSI mulai beroperasi, selisih harga antara komoditas Indonesia yang dijual ke luar negeri dengan harga di pasar internasional berkisar 30 persen hingga mendekati 40 persen. Setelah PT DSI menjalankan fungsinya, perbedaan harga tersebut disebut semakin menyempit.

"Dari angka yang masuk sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual Indonesia dan dijual internasional beda minimal 30 persen mendekati 40 persen, begitu ada PT DSI hampir menyatu (grafiknya) karena kita tegas," kata Prabowo.

Klaim Selesaikan Lebih dari 110 Masalah

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan-

nya telah menyelesaikan lebih dari 110 persoalan strategis selama sekitar 18 bulan masa pemerintahan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif Kabinet Merah Putih dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

Prabowo menjelaskan sidang kabinet pertengahan tahun sengaja digelar sebagai bagian dari persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Menurutnya, secara tradisi presiden akan menyampaikan laporan kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir.

"Hari ini saya sengaja melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026, menjelang 17 Agustus 2026, dimana sudah secara tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan beberapa hari sebelum 17 Agustus untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa dan negara apa yang sudah dikerjakan selama satu tahun kerja itu," ujar Prabowo.

Ia mengatakan jajaran kabinet telah bekerja keras menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah. Meski demikian, Prabowo meminta para menterinya tetap rendah hati dan tidak bersikap sombong atas berbagai capaian yang diraih.

"Kita rendah hati, kita tidak mau menepuk dada, kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya, watak bangsa kita: ojo dume. Tetapi kalau kita berprestasi, kita akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri," tegasnya.

Prabowo mengungkapkan, berdasarkan perhitungan pemerintah, lebih dari 108 hingga 110 persoalan berhasil diselesaikan dalam satu tahun lebih atau sekitar 18 bulan masa pemerintahannya.

"Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil," katanya. (tin,ist,kum/dya)

PELIBATAN TNI-POLRI DALAM PENGAWASAN PAJAK DISOROT DPR

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026 itu memicu perhatian DPR, yang mengingatkan agar implementasinya tidak menimbulkan rasa takut di kalangan wajib pajak.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui penguatan kepatuhan pajak pada dasarnya patut didukung. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya disertai mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau moral hazard oleh petugas di lapangan.

"Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, tugasnya dijalankan ada tugas tambahan. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita, jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyarankan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengedepankan pendekatan persuasif sebelum kebijakan diterapkan secara luas. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih dulu mengundang para wajib pajak besar untuk menjelaskan tujuan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan kegaduhan.

"Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling tidak diundang dulu para wajib pajak yang besar-besar diundang, 'Nih negara maunya begini, ini begini.' Intinya itu," katanya.

Utut menambahkan, pembahasan teknis mengenai kebijakan perpajakan merupakan kewenangan Komisi XI DPR RI, bukan Komisi I.

"Ini kan di Komisi XI. Keuangan tadi juga ada Pak Ricardo, direktur dari Pajak, dan juga staf ahli Menteri Keuangan tentang pengawasan pajak," ujarnya.

DJP: Hanya Mendampingi

Menanggapi polemik yang berkembang, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, menegaskan pelibatan aparat TNI dan Polri tidak memberikan kewenangan baru kepada kedua institusi tersebut dalam pengawasan perpajakan.

"Hanya sekadar pendampingan. Kita tidak memberikan kewenangan baru kepada mereka (aparat TNI/Polri)," kata Inge di sela diskusi bersama media di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Ia menegaskan kewenangan pengawasan tetap sepenuhnya berada di Direktorat Jenderal Pajak. Aparat



Ilustrasi pengurusan pajak oleh masyarakat dengan mengaktifkan Coretax. (dok)

TNI dan Polri hanya dilibatkan dalam kondisi tertentu ketika diperlukan.

"Kewenangan tetap berada di kami, tetapi mereka mendampingi kami semata-mata hanya untuk tempat-tempat tertentu saja," ujarnya.

Menurut Inge, pola kerja sama tersebut bukan hal baru. Selama ini DJP telah berkoordinasi dengan aparat kewilayahan apabila petugas membutuhkan dukungan saat melakukan kegiatan lapangan.

"Misalnya, kalau ada wajib pajak yang sebetulnya kita mengetahui punya potensi dan kita ketahui alamatnya di suatu tempat, ternyata tempat itu mungkin ada satu hal yang harus dijaga atau kami butuh penanganan khusus dalam transportasi, kami minta bantuan mereka (aparat). Itu boleh," jelasnya.

Melalui akun Instagram resmi @ditjenpajakri, DJP juga membantah anggapan bahwa Babinsa akan memburu data pajak hingga ke desa-desa.

"Aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan pajak, melainkan hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur," tulis DJP.

DJP juga menegaskan bahwa SE-8/PJ/2026 merupakan pedoman internal untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang selama ini telah berjalan agar lebih seragam dan akuntabel.

Selain itu, DJP menekankan pengawasan kepatuhan kini semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital berbasis risiko.

"Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif," tulis DJP.

Mabes TNI: Belum Ada Pembahasan

Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan belum ada pembahasan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan hingga saat ini TNI belum menerima pembahasan maupun koordinasi mengenai implementasi kebijakan tersebut.

"Belum ada wacana atau pembahasan ke arah sana (pelibatan Babinsa dalam urusan pajak)," kata Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).

Nas menjelaskan, karena belum ada pembicaraan antara TNI dan Kementerian Keuangan, maka hingga kini juga belum terdapat aturan yang menjadi dasar bagi Babinsa untuk terlibat dalam pengawasan perpajakan.

Dalam SE-8/PJ/2026 dijelaskan bahwa pengumpulan data ekonomi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui dua metode, yakni pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data non-lapangan.

Poin Utama SE-8/PJ/2026 terkait Pengawasan Pajak:

- **Jejaring Informasi:**
Melibatkan keterlibatan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri).
- **Teknologi & Data:**
Meliputi penggunaan remote sensing, web scraping, dan pemanfaatan informasi media.
- **Pendekatan Lapangan:**
Mencakup visitasi, penyisiran (canvassing), serta pengamatan langsung.
- **Analisis Strategis:**
Melakukan bedah kawasan ekonomi, telaah jurnal ilmiah, dan mirroring hasil penyidikan.



Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, lokasi usaha, tempat praktik pekerjaan bebas wajib pajak maupun pihak terkait guna menemukan subjek dan/atau objek pajak.

"Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak maupun pihak terkait untuk menemukan subjek dan/atau objek pajak," tulis Bimo dalam surat edaran tersebut.

Sementara itu, pengumpulan data non-lapangan dilakukan tanpa kunjungan langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai sarana administrasi.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas berperan membangun jejaring informasi untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak yang telah maupun belum terdaftar serta memetakan potensi perpajakan di suatu wilayah.

SE-8/PJ/2026 juga menyebut pengawasan dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pemanfaatan remote sensing, web scraping, serta informasi dari berbagai media.

"Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, seperti visitasi, penyisiran (canvassing), pengamatan langsung, pembangunan jejaring informasi (melalui Bintara Pembina Desa/Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)," tulis Bimo. (tin,ist,ini/dya)

HAJI 2027 DISIAPKAN LEBIH AWAL, KEMENHAJ UMUMKAN WAITING LIST JEMAAH

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan mengumumkan daftar calon jemaah yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list). Saat ini, nama-nama calon jemaah tersebut masih menjalani proses verifikasi di tingkat kabupaten dan kota sebelum ditetapkan sebagai peserta penyelenggaraan haji tahun depan.



Ilustrasi Jemah haji tiba di Tanah Air. (Dok)

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pengumuman daftar tunggu dilakukan lebih awal agar pemerintah memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan seluruh tahapan persiapan, baik dari sisi administrasi, pelayanan, maupun pembinaan calon jemaah.

"Jemaah yang akan berangkat tahun 2027 sudah kita umumkan. Saat ini sedang dalam proses verifikasi," kata Dahnil dalam keterangannya, Senin (20/7).

Menurut Dahnil, langkah tersebut merupakan bagian dari perubahan pola kerja penyelenggaraan haji agar seluruh proses tidak lagi dilakukan secara terburu-buru menjelang musim keberangkatan. Dengan kepastian daftar calon jemaah sejak dini, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk memastikan kesiapan dokumen, pelayanan, hingga koordinasi lintas daerah.

Verifikasi yang kini berlangsung di tingkat kabupaten dan kota juga diharapkan dapat menghasilkan data calon jemaah yang lebih akurat sehingga memudahkan penyusunan berbagai kebutuhan operasional haji 2027.m

ASN Diminta Bangun Kedekatan

Selain mempersiapkan aspek teknis, Kemenhaj menaruh perhatian

besar pada pembinaan calon jemaah. Untuk itu, Dahnil menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenhaj, mulai dari kepala kantor wilayah, kepala kantor kementerian di daerah, hingga petugas haji, agar segera membangun komunikasi yang intensif dengan para calon jemaah.

"Yang harus dipersiapkan adalah Bapak dan Ibu semuanya harus punya engagement yang kuat dengan jemaah. Mulai dari ASN, Kakanwil, petugas haji, semua yang mengurus haji harus punya engagement yang kuat dengan jemaah," ujarnya.

Menurut Dahnil, hubungan yang dibangun tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berkembang menjadi hubungan yang dilandasi kepercayaan, kedekatan, dan pembinaan secara berkelanjutan.

Ia bahkan mengaitkan konsep tersebut dengan istilah *ta'lif qulub*, yakni ikatan hati yang terbangun melalui silaturahmi sehingga melahirkan hubungan emosional yang kuat antara petugas dan jemaah selama proses penyelenggaraan ibadah haji..

Dengan hubungan yang erat sejak sebelum keberangkatan, pemerintah berharap pelayanan kepada jemaah menjadi lebih efektif sekaligus mampu meningkatkan kualitas pembinaan selama masa persiapan..

Dahnil menegaskan Kementerian

Haji dan Umrah tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga yang mengurus keberangkatan jemaah layaknya biro perjalanan atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Menurutnya, kementerian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki mandat lebih besar, yakni membina, mengawal, serta memastikan ibadah haji memberikan dampak positif bagi kehidupan para jemaah setelah kembali ke Tanah Air.

"Kemenhaj bukan sekadar menyelenggarakan keberangkatan, melainkan juga memastikan ada transformasi nilai bagi para jemaah," ujarnya.

Transformasi yang dimaksud tidak hanya menyangkut keberhasilan pelaksanaan ibadah secara ritual, tetapi juga pembentukan nilai-nilai kebangsaan, moral, peradaban, dan keadaban. Konsep tersebut dirumuskan Kemenhaj dalam program Tri Sukses, yaitu:

Sukses Ritual, yakni memastikan jemaah mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah sesuai tuntunan.

Sukses Ekonomi, yaitu mendorong manfaat ekonomi yang lebih luas dari penyelenggaraan haji.

Sukses Peradaban dan Keadaban, yakni menjadikan ibadah haji sebagai sarana membentuk karakter, moral, dan kontribusi sosial para jemaah setelah kembali ke masyarakat.

TREN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

2022

RP 97,79 JUTA

2023

RP 90,05 JUTA

2024

RP 93,41 JUTA

2025

RP 89,41 JUTA

2026

RP 87,41 JUTA

2027

RP 107,34 JUTA

Catatan Usulan Kenaikan

Signifikan: Naik sekitar Rp 19,93 juta dari tahun 2026.

"Bukan sekadar terkait penyelenggaraannya saja, tetapi harus ada transformasi nilai. Nilai kebangsaan, nilai moral, nilai peradaban, nilai keadaban yang kemudian kita rumuskan melalui Tri Sukses," kata Dahnil.

Wamenhaj kembali mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj agar tidak menunggu tahapan berikutnya untuk mulai bekerja di lapangan. Ia meminta kantor-kantor wilayah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sekaligus membangun komunikasi aktif dengan calon jemaah yang telah masuk daftar tunggu.

"Segera dekati dan mulai bangun komunikasi dengan jemaah," tegasnya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang lebih tertata, terencana, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Dengan persiapan yang dimulai lebih awal, pemerintah menargetkan proses administrasi, pembinaan, hingga pelayanan kepada calon jemaah dapat berjalan lebih efektif dibanding penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya.(wid,ist/dya)

DIDUGA BOCOR GAS, RUMAH GRAND POLONIA MELEDAK

Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Jalan Perhubungan Udara, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (20/7) sekitar pukul 15.30 WIB. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya tiga orang, melukai sejumlah korban, serta merusak sekitar tujuh rumah di sekitar lokasi akibat kuatnya ledakan yang diduga dipicu kebocoran pipa gas bawah tanah.



Petugas menyisir lokasi usai ledakan mengguncang sebuah rumah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (20/7) sore. (ist.dok)

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvinj Simanjuntak mengatakan hasil investigasi awal mengarah pada dugaan kebocoran pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah sebagai penyebab ledakan. Meski demikian, polisi masih mendalami penyebab pasti insiden tersebut.

"Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah," kata Jean.

Ia menjelaskan ledakan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB dan hingga kini proses penyelidikan masih berlangsung. "15.30 WIB sore tadi terjadi ledakan di Grand Polonia. Kini investigasi masih berlangsung," ujarnya.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat enam orang yang berada di dalam rumah ketika ledakan terjadi. Hingga Senin petang, petugas

gabungan telah mengevakuasi dua korban, yakni seorang pria dewasa dan seorang balita yang langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

"Saat ini data yang kami dapatkan, ada enam orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dari enam orang itu, seorang bapak berhasil dievakuasi," ujar Jean.

Sementara itu, dua korban dipastikan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Keduanya merupakan pemilik rumah dan seorang asisten rumah tangga (ART). Satu korban lainnya masih dalam proses pencarian saat evakuasi berlangsung.

Diduga Kebocoran Pipa Gas

Jean menambahkan, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan adanya

kandungan gas di lokasi kejadian yang memperkuat dugaan kebocoran pipa gas bawah tanah.

"Hasil investigasi awal menunjukkan adanya kebocoran dari pipa gas tanam. Tadi kami sudah masuk menggunakan alat pendeteksi gas dan memang terdeteksi adanya gas di lokasi tersebut," katanya.

Seorang saksi mata, Ali, yang bekerja sebagai tukang bangunan di rumah sebelah lokasi kejadian, mengaku sedang memasang keramik ketika tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras.

"Saya lagi pasang keramik. Tiba-tiba dengan suara, suaranya dahsyat, getarannya kencanglah," ujar Ali.

Menurutnya, ledakan tersebut begitu kuat hingga mengguncang bangunan di sekitar dan memecahkan kaca-kaca rumah.

"Saya kerja bangunan di sebelah rumah yang sumber ledakan. Ledakannya dahsyat, goyang semua, getarannya kencang. Jendelanya pecah semua," katanya.

Ali memperkirakan getaran ledakan terasa hingga radius sekitar 40-50 meter, sehingga warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah.

Ia mengatakan rumah yang menjadi pusat ledakan saat itu sedang direnovasi. Karena bekerja di bangunan sebelah, ia mengetahui ada sejumlah pekerja di lokasi ketika insiden terjadi.

"Rumahnya lagi direhab. Saya kerja di sebelah rumah itu. Yang dua tadi ada

KRONOLOGI LEDAKAN GRAND POLONIA MEDAN

(Senin, 20 Juli 2026)

15.50 WIB Ledakan Terjadi

Ledakan dahsyat menghancurkan rumah mewah No. 3B di Grand Polonia. Material bangunan rusak sedikitnya 5 rumah di sekitarnya.

16.00-17.30 WIB Evakuasi Awal

Warga bersama petugas mengevakuasi korban. Tim Damkar, BPBD, dan Polrestabes Medan mengamankan lokasi serta mencari korban tertimbun.

17.30-19.30 WIB Korban Ditemukan

Sebanyak 4 korban sempat tertimbun. Tiga orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka.

20.00 WIB Dugaan Penyebab

Polisi menduga ledakan dipicu kebocoran gas. Dugaan bom maupun teror belum ditemukan, sementara penyebab pasti masih diselidiki Labfor.



keluar terluka, mungkin yang bekerja di rumah yang meledak," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya di lokasi, terdapat tiga korban dalam peristiwa tersebut.

"Setahu saya ada tiga, kemungkinan meninggal. Yang dua positif sudah meninggal," katanya.

Ali mengaku tidak mengetahui penyebab pasti ledakan. Meski kawasan tersebut memiliki jaringan pipa gas, ia tidak melihat adanya kobaran api setelah ledakan terjadi. Yang terlihat hanyalah bangunan yang langsung runtuh akibat kuatnya tekanan ledakan.

"Asbes pada hancur semua. Nggak ada. Yang gosong nggak ada atau api, pas runtuh langsung ambruk. Hampir ada 70 persenlah (kerusakan)," ujarnya.

Akibat ledakan tersebut, sedikitnya tujuh rumah di Kompleks Grand Polonia mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Polisi bersama tim gabungan hingga Senin malam masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan, serta mendata kerusakan akibat ledakan. Area sekitar lokasi juga telah dipasang garis polisi guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. (wid ist kum, ini/dya)



Pertanian Produktif Tergerus, Pemkot Batu Siapkan Perlindungan 423 Ha Lahan

BATU - Pemerintah Kota Batu menyiapkan perlindungan terhadap sekitar 423 hektare (Ha) lahan pertanian melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi tersebut untuk mengendalikan alih fungsi lahan di tengah keterbatasan ruang sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

"Dari luas lahan pertanian keseluruhan, insyaallah nanti sekitar 423 hektare LP2B Kota Batu," ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Batu, Hendry Suseno, Senin (20/7/2026).

Dijelaskannya, keberadaan perda nantinya menjadi instrumen pengendalian agar alih fungsi lahan tidak terus menggerus kawasan pertanian produktif. Menurutnya, Kota Batu memiliki tantangan tersendiri karena ketersediaan lahan relatif terbatas.

Sekitar 60 persen wilayah Kota Batu merupakan kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Sementara 40 persen sisanya harus dibagi untuk

lahan pertanian, kawasan permukiman, perkantoran hingga destinasi wisata yang terus berkembang.

"Kami membuat rambu-rambu agar alih fungsi lahan tidak sampai mengganggu ketersediaan lahan pangan," katanya.

Hendry menambahkan, ketika Ranperda LP2B telah disahkan menjadi perda, setiap pemilik lahan yang masuk dalam kawasan LP2B wajib mempertahankan fungsi lahannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Batu juga menyiapkan sejumlah insentif bagi petani maupun pemilik lahan yang berkomitmen mempertahankan lahan pertaniannya.

"Artinya untuk mendukung ketahanan pangan kami bisa membantu dengan sarana produksi pertanian (saprodi) dan bantuan lain. Tentu sosialisasi terkait regulasi yang ada akan dilakukan," tuturnya.

Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) LP2B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono mengatakan, penyusunan Raperda

LP2B merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan setiap daerah memiliki kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Dari pemerintah pusat sudah ada aturannya, setiap daerah harus mempunyai LP2B. Kalau tidak, tentu akan menyulitkan ketersediaan lahan pangan, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan," katanya.

Menurut Bambang, pembahasan raperda saat ini masih difokuskan pada sinkronisasi dengan perubahan tata ruang serta pemutakhiran data lahan pertanian yang masih eksis di Kota Batu. Pansus juga berkoordinasi dengan DPKP dan pemerintah desa untuk memetakan kondisi riil di lapangan.

Data tersebut akan menjadi dasar penetapan kawasan LP2B sekaligus



Ilustrasi: Lahan pertanian di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. (Santi/Lentera)

mengidentifikasi lahan yang telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman maupun bangunan.

Bambang mengatakan, apabila terdapat lahan yang sebelumnya direncanakan masuk LP2B namun telah berubah fungsi, pemerintah akan mencari lahan pengganti dengan luas yang setara agar target kawasan pertanian yang dilindungi tetap terpenuhi. (Santi/Dya)

Kurangi Beban APBD, DPRD Usul MCC jadi BLUD



Gedung Malang Creative Center. (Santi/Lentera)

MALANG - DPRD Kota Malang mengusulkan agar gedung Malang Creative Center (MCC) dikelola dengan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan baru tersebut dinilai akan lebih profesional, mandiri secara finansial dan tidak lagi membebani APBD. Langkah ini sekaligus tetap mempertahankan fungsi sosialnya sebagai ruang pembinaan pelaku ekonomi kreatif.

Usulan tersebut muncul setelah Komisi B DPRD Kota Malang mengevaluasi penerapan retribusi di MCC pasca berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sejak awal

2025.

"Sejak Agustus diberlakukan penerimaan retribusi ini, targetnya setiap bulan sekitar Rp100 juta. Namun realisasinya masih sekitar Rp300 juta sekian untuk lima bulan terakhir di 2025," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, Senin (20/6/2026).

Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi karakteristik aktivitas di MCC yang tidak seluruhnya bersifat komersial. Hingga kini masih banyak kegiatan sosial, komunitas, hingga pelaku UMKM yang mengajukan keringanan biaya penggunaan fasilitas.

Melihat kondisi tersebut, Bayu mendorong agar Pemkot Malang mulai mengkaji perubahan pola pengelolaan MCC menjadi BLUD. Dinilainya, skema tersebut akan memberikan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan sumber pendapatan tanpa harus bergantung penuh pada APBD.

"Kalau BLUD, pengelolaannya relatif lebih independen. Ada retribusi

yang dikelola sendiri, bahkan memungkinkan kerja sama seperti naming rights gedung," jelasnya.

Ia menilai pemberian hak penamaan gedung kepada pihak ketiga bukan sesuatu yang perlu dihindari apabila mampu meningkatkan keberlanjutan operasional MCC.

Bayu mencontohkan, Solo Technopark yang menurutnya mampu beroperasi secara mandiri. Dengan anggaran operasional sekitar Rp24 miliar, kontribusi APBD hanya sekitar 1%, sementara sisanya berasal dari pengelolaan mandiri sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Bayu mengungkapkan, pada awal beroperasi MCC memperoleh anggaran operasional sekitar Rp7,5 miliar. Namun pada 2026 anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp3,5 miliar dan sebagian besar hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai.

"Jumlah karyawan juga dipotong hampir separuh. Padahal nanti ketika usia bangunan sudah lima tahun ke atas, tentu mem-butuhkan biaya pemeliharaan yang lebih besar. Kalau hanya mengandalkan APBD akan

berat," katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyatakan terbuka terhadap gagasan menjadikan MCC sebagai BLUD. Ditegaskannya, status BLUD bukan berarti MCC akan dikelola swasta. "Bukan. BLUD tetap pemerintah, tetapi nanti memiliki manajemen sendiri," ujarnya.

Terkait tahapan berikutnya, Eko mengatakan pihaknya akan lebih dahulu melaporkan usulan tersebut kepada Wali Kota Malang sebelum dilakukan koordinasi lanjutan bersama DPRD.

Disinggung mengenai penerimaan retribusi MCC, Eko menjelaskan pada 2025 penerimaan sudah mulai masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dan berlanjut pada 2026. Nilai retribusi masih berkisar hampir Rp1 miliar per tahun.

Namun pemerintah menargetkan peningkatan yang cukup signifikan pada 2027. "Di 2025 sekitar hampir Rp1 miliar, 2026 juga masih sekitar Rp1 miliar. Untuk 2027 target penerimaannya Rp7 miliar," ungkapnya. (Santi/Dya)

DERETAN PEJABAT SINGAPURA YANG MUNDUR KARENA SKANDAL ETIKA

2012 – Michael Palmer

- Ketua Parlemen Singapura.
- Mundur setelah mengaku berselingkuh dengan staf People's Association

2016 – David Ong

- Anggota Parlemen PAP.
- Mengundurkan diri karena hubungan asmara dengan relawan partai.

2023 – Tan Chuan-Jin & Cheng Li Hui

- Ketua Parlemen dan anggota parlemen PAP.
- Terlibat hubungan di luar nikah.
- Keduanya mundur dari parlemen dan partai.

2023 – Leon Perera & Nicole Seah

- Politisi Workers' Party.
- Video kebersamaan memicu skandal hubungan pribadi.
- Keduanya mengundurkan diri dari partai dan parlemen.



Meski penyelidikan menyimpulkan tidak ada unsur tindak pidana dan tidak ada tuntutan hukum terhadap kedua pihak, Wong menegaskan persoalan utama bukan semata aspek legal, melainkan standar integritas yang harus dijaga oleh seorang pemegang jabatan publik.

Dalam pernyataan resminya, Kantor Perdana Menteri (Prime Minister's Office/PMO) menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari sebuah surat elektronik yang dikirim seorang perempuan kepada PMO mengenai interaksinya dengan Faishal.

"Masalah ini sampai ke perhatian kami sekitar sebulan yang lalu ketika Kantor Perdana Menteri menerima email dari seorang perempuan anggota masyarakat mengenai interaksinya dengan Associate Professor Faishal," kata Wong.

PM kemudian memerintahkan agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Faishal dan perempuan tersebut diwawancarai secara terpisah untuk memperoleh keterangan masing-masing.

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian besar interaksi keduanya berlangsung melalui pesan-pesan daring. Mereka juga beberapa kali bertemu di sela-sela kegiatan publik.

Belakangan, kedua belah pihak saling mengajukan tuduhan pelecehan (harassment).

Kasus tersebut kemudian diserahkan kepada Kepolisian Singapura untuk diselidiki.

"Setelah mempertimbangkan



Buntut Interaksi Online dengan Perempuan MENTERI SINGAPURA MUNDUR MESKI TAK LANGGAR HUKUM

Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim Singapura sekaligus anggota parlemen dari Partai Aksi Rakyat (People's Action Party/PAP), Muhammad Faishal Ibrahim, mengundurkan diri dari seluruh jabatan politiknya setelah interaksi pribadinya dengan seorang perempuan dinilai tidak memenuhi standar etik yang diharapkan dari seorang pejabat publik. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Senin (20/7), setelah pemerintah menyelesaikan pemeriksaan internal dan penyelidikan kepolisian atas laporan yang diterima sekitar satu bulan lalu.

fakta dan keadaan secara saksama, serta berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung, dinilai bahwa tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena itu tidak akan ada tindakan pidana terhadap salah satu dari mereka," ujar Wong.

Namun, menurut Wong, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting. "Terdapat pertanyaan terpisah mengenai apakah perilaku Associate Professor Faishal memenuhi standar yang diharapkan dari seorang pemegang jabatan politik dan anggota parlemen."

"Setelah merenungkan masalah tersebut, Associate Professor Faishal mengakui bahwa perilakunya tidak memenuhi standar tersebut, dan mengajukan pengunduran diri," lanjutnya.

Akui Salah Menilai Situasi

Dalam surat pengunduran dirinya kepada Lawrence Wong yang turut dipublikasikan PMO, Faishal mengakui telah melakukan kesalahan dalam menangani interaksi tersebut.

Politikus berusia 58 tahun yang telah menikah dan memiliki dua anak itu menegaskan tidak pernah terjadi hubungan fisik dengan perempuan tersebut. Namun, ia

mengakui gagal menetapkan batasan yang jelas sejak awal.

"Walaupun tidak ada hubungan fisik di antara kami, dan saya tidak pernah bermaksud agar interaksi itu berkembang menjadi hubungan semacam itu, saya melakukan kekeliruan dalam cara menangani interaksi tersebut dan gagal menetapkan batasan yang lebih jelas sejak tahap awal," tulis Faishal.

Ia juga menyatakan perilakunya tidak sejalan dengan standar yang diemban seorang pejabat publik.

"Saya menyadari bahwa perilaku saya tidak memenuhi standar yang diharapkan dari saya maupun tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saya."

"Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa langkah yang tepat adalah mengundurkan diri dari dunia politik agar saya dapat mencurahkan waktu dan perhatian kepada keluarga saya," tulisnya lagi.

Lawrence Wong mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. "Saya sedih Faishal harus meninggalkan dunia politik dalam situasi seperti ini," kata Wong.

Selain melepaskan jabatan sebagai Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim, Faishal juga

mengundurkan diri sebagai anggota parlemen (MP) serta keluar dari Partai Aksi Rakyat (PAP), partai yang telah menaunginya selama hampir dua dekade.

Faishal merupakan anggota parlemen sejak 2006 dan dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim pada 2025. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Senior Minister of State pada Kementerian Dalam Negeri Singapura.

Pemerintah Singapura menunjuk Zaqqy Mohamad untuk segera mengambil alih tugas sebagai Pelaksana Tugas Menteri Urusan Muslim guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

Tak lama setelah pengumuman resmi, Faishal juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga Marine Parade-Braddell Heights yang diwakilinya selama ini, serta kepada para pendukung yang menurutnya telah ia kecewakan.

Kasus Faishal kembali menempatkan standar etik pejabat publik Singapura menjadi sorotan.

Dalam beberapa tahun terakhir, PAP yang selama puluhan tahun membangun reputasi sebagai partai dengan pemerintahan yang bersih menghadapi sejumlah kasus yang menguji citra tersebut. (gus,rtr,rls,ist/dya)

Jangan Dibuang!

Manfaatkan Kulit Bawang untuk Berkebun di Rumah

Kulit bawang yang biasanya berakhir di tempat sampah ternyata masih memiliki banyak manfaat untuk berkebun di rumah. Limbah dapur ini dapat dimanfaatkan untuk membantu menyuburkan tanah, menjaga kesehatan tanaman, sekaligus mengurangi sampah organik rumah tangga.

Mengutip The Spruce, kulit bawang mengandung sejumlah mineral yang bermanfaat bagi tanah. Kandungan tersebut dapat dimanfaatkan kembali melalui berbagai cara sederhana yang mudah diterapkan di rumah tanpa memerlukan biaya besar.

Campurkan ke dalam kompos

Kulit bawang dapat menjadi salah satu bahan organik untuk membuat kompos rumahan. Saat terurai, kulit bawang akan menyumbangkan bahan organik yang membantu memperbaiki struktur tanah sekaligus menambah unsur hara.

Agar proses penguraian berlangsung lebih cepat, gunting atau potong kulit bawang menjadi ukuran kecil sebelum dimasukkan ke dalam wadah kompos. Campurkan dengan limbah dapur lain, seperti kulit buah, sisa sayuran, atau daun kering. Pastikan kompos diaduk secara berkala agar proses dekomposisi berlangsung merata.

Kubur langsung di media tanam

Jika belum memiliki komposter, kulit bawang dapat langsung dimanfaatkan dengan cara menguburnya di dalam pot atau bedeng tanaman.

Buat lubang sedalam sekitar 5-10 sentimeter di sekitar tanaman, lalu masukkan beberapa lembar kulit bawang dan tutup kembali dengan tanah. Seiring waktu, kulit bawang akan terurai secara alami dan melepaskan nutrisi yang dapat dimanfaatkan

tanaman. Cara ini cocok diterapkan pada tanaman cabai, tomat, bunga, maupun sayuran lainnya.

Buat pupuk cair sederhana

Kulit bawang juga dapat diolah menjadi larutan organik yang digunakan sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Caranya, masukkan segenggam kulit bawang ke dalam wadah berisi sekitar satu liter air, kemudian rendam selama dua hingga tiga hari. Setelah itu, saring air rendaman dan gunakan untuk menyiram media tanam atau bagian pangkal tanaman. Larutan ini sebaiknya digunakan secukupnya dan tidak menggantikan pupuk utama.

Manfaatkan sebagai pengusir hama alami

Aroma khas bawang dipercaya kurang disukai oleh beberapa jenis serangga sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara alami untuk membantu mengurangi gangguan hama.

Anda dapat menaburkan kulit bawang di sekitar pangkal tanaman atau menyemprotkan air rendaman kulit bawang ke area yang sering didatangi serangga. Meski demikian, cara ini lebih tepat digunakan sebagai langkah pencegahan dan bukan pengganti pestisida jika serangan hama sudah berat.

Jadikan campuran mulsa

Kulit bawang kering juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan mulsa organik.

Campurkan kulit bawang dengan daun kering, rumput yang telah dipotong, atau jerami, kemudian sebar di permukaan tanah di sekitar tanaman.

Lapisan mulsa membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, sekaligus melindungi akar dari suhu yang terlalu panas. Setelah membusuk, kulit bawang akan menambah kandungan bahan organik di dalam tanah.

Masukkan ke lubang kompos di kebun

Bagi yang memiliki halaman, membuat lubang kompos sederhana bisa menjadi cara efektif memanfaatkan limbah dapur, termasuk kulit bawang.

Lubang tersebut dapat diisi secara bertahap dengan kulit bawang, sisa sayuran, daun kering, dan bahan organik lainnya. Setelah beberapa waktu, seluruh bahan akan terurai menjadi kompos alami yang dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan menyuburkan tanaman di sekitarnya.

Sesuaikan dengan jenis tanaman

Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan kulit bawang tetap perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan.

Sejumlah ahli berkebun menyarankan agar kulit bawang tidak digunakan terlalu dekat dengan tanaman dari keluarga kacang-kacangan, seperti buncis dan kacang panjang.

Sebaliknya, bahan organik ini dinilai lebih cocok dimanfaatkan pada tanaman cabai, tomat, terong, maupun berbagai tanaman hias yang umum ditanam di pekarangan rumah. Memanfaatkan kulit bawang untuk berkebun merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja.

Selain membantu menyuburkan tanah dan mengurangi limbah organik rumah tangga, kebiasaan ini juga menjadi bagian dari praktik berkebun yang lebih ramah lingkungan dengan biaya yang sangat minim. (far,ist/dya)

Sampah organik dapur yang masih memiliki nilai guna

Kulit Pisang

- Kaya kalium yang mendukung pembungaan dan pembuahan.
- Dapat dicacah lalu dikubur di sekitar tanaman.

Ampas Kopi

- Menambah bahan organik tanah.
- Membantu memperbaiki struktur media tanam.

Cangkang Telur

- Sumber kalsium alami.
- Sebaiknya dicuci, dikeringkan, lalu ditumbuk halus sebelum dicampurkan ke tanah atau kompos.

Kulit Jeruk

- Dapat dijadikan kompos setelah dicacah.
- Aroma citrus dapat membantu mengurangi gangguan beberapa serangga.

Implan Otak Komersial Pertama di Dunia Dilakukan China

Peta persaingan teknologi dunia kini memasuki babak baru yang semakin intensif, bergeser dari sekadar penguasaan kecerdasan buatan konvensional menuju integrasi langsung antara mesin dan otak manusia. Langkah agresif China dalam melegalkan penggunaan komersial perangkat brain-computer interface (BCI) tidak hanya memicu lompatan besar dalam dunia medis, tetapi juga secara resmi menyalut sumbu kompetisi neuroteknologi tingkat tinggi melawan dominasi korporasi barat.

Keberhasilan
Borui Kang
Medical
Technology
(Neuracle)
menana

mkan perangkat Neural Electronic Opportunity (NEO) pada pasien lumpuh menandai era baru pemanfaatan teknologi invasif di luar uji klinis laboratorium. Melalui izin resmi dari regulator nasional China (NMPA), perangkat berukuran koin dengan delapan elektroda ini membuktikan keandalannya dalam menerjemahkan sinyal listrik dari korteks otak menjadi perintah motorik pada sarung tangan robotik.

Pencapaian ini menempatkan Tiongkok satu langkah di depan Neuralink milik Elon Musk, yang meskipun telah sukses melakukan uji klinis pada manusia sejak 2024, masih

harus tertahan di koridor regulasi FDA sebelum bisa menjangkau pasar komersial secara legal.

Bagi Beijing, akselerasi neuroteknologi ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari cetak biru strategis yang tertuang dalam rencana pembangunan lima tahunan negara tersebut. Menempatkan teknologi antarmuka otak sejajar dengan komutasi kuantum dan robotika berbasis AI menegaskan ambisi Tiongkok untuk memimpin ekosistem industri masa depan.

Respons global pun mulai terlihat dengan lahirnya World Artificial Intelligence Cooperation Organization yang didirikan atas inisiatif China, di mana kekuatan ekonomi berkembang seperti Indonesia turut bergabung sebagai anggota pendiri untuk mengamankan posisi dalam peta adopsi AI dunia.

Di sisi lain, lanskap kompetisi global ini juga memicu pendekatan alternatif yang lebih aman dan minim risiko. Raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Meta memilih jalur non-invasif lewat pengembangan sistem Brain2Qwerty yang memanfaatkan large language model (LLM) untuk mengubah aktivitas otak menjadi teks tanpa perlu meja operasi.

Sementara itu, variasi inovasi juga lahir dari pemanfaatan teknologi electromyography (EMG) seperti yang

diaplikasikan pada tangan prostetik bionik besutan BrainCo. Keragaman pendekatan ini menegaskan bahwa perebutan takhta teknologi masa depan tidak lagi hanya terjadi di ruang siber, melainkan langsung pada jaringan saraf manusia. (far,ist/dya)

Perkembangan Teknologi Implan Otak

1. Neuralink (AS)

Metode: Invasif (tanam cip langsung ke otak dengan robot bedah).

Fungsi: Mengendalikan perangkat digital (kursor/HP) lewat pikiran.

Status: Sukses uji klinis pada manusia sejak 2024, menanti izin komersial FDA.

2. Synchron (AS)

Metode: Minimal invasif (memasang alat lewat pembuluh darah leher, tanpa bedah tengkorak).

Fungsi: Membantu pasien lumpuh mengetik, berkirim email, dan belanja online.

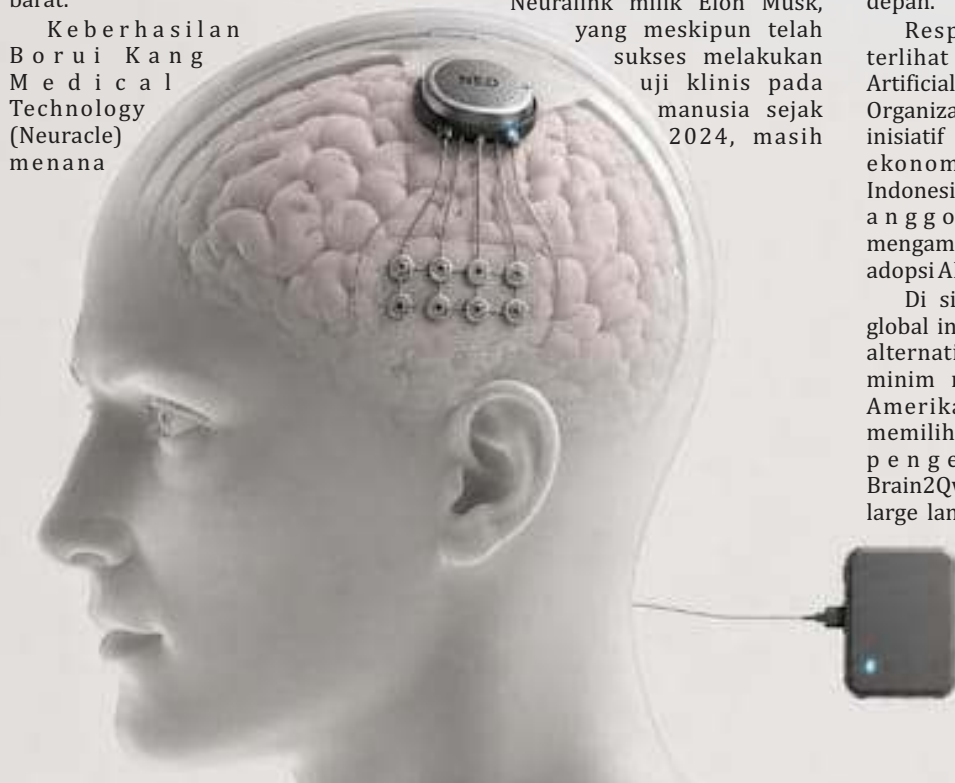
Kelebihan: Jauh lebih aman dari risiko infeksi atau kerusakan jaringan otak.

3. Brain2Qwerty (Meta)

Metode: Non-invasif (hanya menggunakan penutup kepala pemindai luar).

Fungsi: Memanfaatkan AI (LLM) untuk mengubah gelombang otak langsung menjadi teks secara instan.

Target: Alat bantu komunikasi bagi penderita penyakit neurodegeneratif seperti ALS.



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAH I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Evolusi Lingerie as Outerwear

Tren Silky Camisole Top di Kalangan 'It Girl'

Siklus tren mode memang selalu punya cara unik untuk mengejutkan kita, membalikkan apa yang tadinya dianggap usang menjadi kiblat gaya baru. Memasuki pertengahan 2026, giliran silky camisole top yang kembali naik daun dan benar-benar menguasai panggung jalanan (street style) kota-kota besar.

Atasan berbahan satin atau sutra yang punya potongan minimalis, simpel, dan super tipis ini dulunya adalah primadona yang merajai panggung peragaan busana serta gaya kasual para bintang film Hollywood di era akhir 90-an hingga awal 2000-an.

Menariknya, pakaian yang sempat identik dan dikurung sebagai baju tidur di dalam kamar ini sekarang justru melenggang bebas di ruang publik. Melalui konsep lingerie as outerwear yang semakin diterima luas, batas antara pakaian dalam dan pakaian luar kini menjadi sangat cair,

melahirkan sebuah estetika baru yang terkesan santai, sedikit sensual, namun tetap memancarkan keanggunan yang elegan.

Jika menengok sejarah perputarannya, tren ini sebenarnya bukan barang baru yang mendadak muncul dari ruang hampa. Catatan arsip mode menunjukkan bahwa ikon budaya pop masa lalu seperti Britney Spears, Victoria Beckham, Kate Hudson, hingga Paris Hilton sudah lebih dulu memopulerkan camisole berenda ini untuk gaya kasual sehari-hari mereka.

Pengaruh tayangan kultural seperti serial televisi *Sex and the City* juga memegang peranan historis yang sangat besar dalam mengubah persepsi publik, membuktikan bahwa sepotong baju satin tipis bisa terlihat sangat modis jika dibawa keluar rumah.

Di tahun 2026, estafet popularitas Y2K tersebut diteruskan dengan sangat masif oleh barisan 'It Girls' modern seperti Kendall Jenner, Hailey Bieber, hingga Addison Rae dan Zara Larsson yang kerap memamerkan OOTD menawan mereka di mediasosial.

Penata busana ternama di New York, Audree Kate Lopez, bahkan menyebut atasan sutra ini makin mencolok dan diminati karena karakternya yang sangat nyaman, fleksibel, serta fleksibel untuk dipakai di berbagai momen, mulai dari sekadar nongkrong

santai hingga menghadiri festival musik besar.

Untuk pemakaian sehari-hari (daily wear), tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat baju ini tidak terlihat seperti kita baru saja bangun tidur atau lupa mengganti pakaian. Kunci utamanya terletak pada kepiawaian menyeimbangkan kelembutan serta kelenturan bahan sutra dengan elemen pakaian lain yang punya potongan lebih tegas dan kasual.

Panduan Gaya Harian

Gaya harian paling aman dan dijamin nyaman untuk mobilitas tinggi adalah dengan memadukan silky camisole top ini bersama celana jins andalan, baik yang berpotongan straight leg maupun high-waist, atau bahkan dengan cargo pants yang terkesan tomboi. Kontras antara kain satin yang halus dengan kasarnya bahan denim atau kargo akan menciptakan impresi effortless chic yang sangat kuat.

Agar kenyamanan harian tetap terjaga saat beraktivitas seharian, kita tinggal memakai sepatu sneakers putih yang bersih atau flat shoes minimalis. Selain itu, pemilihan warna atasan juga memegang andil besar; memilih warna-warna kalem yang sedang tren seperti muted tones (khaki, sage, atau abu-abu pucat) akan jauh lebih mudah membaur dengan suasana kasual di siang hari ketimbang warna-warna yang terlalu mengkilap atau mencolok.

Bagi yang membutuhkan fleksibilitas gaya dari siang hingga malam hari, misalnya harus lanjut menghadiri agenda formal, rapat santai, atau sekadar aesthetic dinner setelah seharian beraktivitas, atasan

tipis ini tinggal diasasi dengan teknik layering yang cerdas. Kita bisa langsung mendongkrak level formalitas penampilan dengan membalut camisole menggunakan luaran yang berstruktur kuat, seperti oversized blazer, cropped jacket, atau bahkan long coat yang elegan.

Pilihan luaran berpotongan tegas ini secara otomatis menyembunyikan kesan kasual baju tidur dan menggantinya dengan aura profesional yang modis.

Jika ingin tampil sedikit lebih berani dan feminin saat menghabiskan waktu luang, mengganti celana panjang dengan rok mini (mini skirt) yang dipadukan dengan sepatu bot semata kaki (boots) atau hak tinggi (heels) bisa menjadi opsi yang sangat memikat. (farisr/dya)

Jenis Camisole yang ringkas, padat, dan visual-sentris

Classic Silky Camisole

Karakteristik: Potongan simpel dan bersih (clean-cut), bermaterial satin atau sutra polos dengan tali spaghetti tipis.

Lace-Trimmed Camisole

Karakteristik: Memiliki aksesoris renda (lace) di bagian kerah (neckline) atau keliman bawah.

Cowl-Neck Camisole

Karakteristik: Memiliki potongan kerah yang longgar dan jatuh menjuntai secara alami di bagian dada.

Cropped Camisole

Karakteristik: Potongan panjang baju yang sengaja didesain menggantung di atas atau tepat di batas pinggang.



Bak Estafet Korupsi ...dari Hal 1

Efek jera tampaknya belum mempan dalam pemberantasan korupsi di daerah-daerah Indonesia. Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan telah menangkap sedikitnya 16 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, pemerasan, hingga suap jabatan. Sepanjang 2026, lembaga antirasuah itu tercatat menangkap 11 kepala daerah melalui serangkaian operasi senyap. Penindakan terbaru di Nusa Tenggara Barat menjadi OTT kepala daerah ke-11 pada tahun ini sekaligus menambah daftar panjang persoalan tata kelola pemerintahan daerah.

Sebelumnya, KPK telah menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Namun, penindakan tersebut belum menghentikan praktik korupsi di daerah lain.

Hal itu kembali terlihat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7/2026). Rentetan operasi yang terjadi dalam waktu berdekatan menunjukkan praktik rasuah di tingkat kepala daerah masih terus berulang. Penangkapan ini juga menjadi sorotan karena Lalu Ahmad Zaini tercatat memiliki kekayaan lebih dari Rp25,5 miliar.

Operasi tersebut menegaskan komitmen KPK dalam penegakan hukum di daerah. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut saat dikonfirmasi awak media.

Sebelum diamankan, Lalu Ahmad Zaini yang akrab disapa LAZ masih menjalankan aktivitas publik. Pada Senin dini hari, ia menghadiri acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama warga di Alun-alun Giri Menang Park, Lombok Barat.

Video kehadirannya bersama Sekretaris Daerah Lombok Barat, Akhmad Saikhu, sempat beredar di media sosial sebelum tim KPK melakukan penindakan setelah kegiatan tersebut selesai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lokasi pengamanan terhadap bupati.

"Hal yang pasti, Bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Total 19 Orang Diamankan

Selain mengamankan Lalu

Ahmad Zaini di rumah dinas, tim KPK juga bergerak di sejumlah lokasi lain di Lombok Barat untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga terkait. Secara keseluruhan, KPK mengamankan 19 orang dalam operasi tersebut. Kasus ini tidak hanya melibatkan unsur pemerintahan, tetapi juga menyeret Direktur Utama PDAM Lombok Barat, Sudirman. Keterlibatan perusahaan daerah itu menjadi perhatian karena sebelum terjun ke dunia politik, LAZ menghabiskan sekitar 17 tahun sebagai Direktur Utama PDAM Giri Menang yang kini bertransformasi menjadi PT Air Minum Giri Menang.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan per 26 Januari 2026, LAZ memiliki total kekayaan Rp25.560.680.000 tanpa utang. Sebagian besar hartanya berupa 22 bidang tanah dan bangunan senilai Rp14,59 miliar yang tersebar di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, serta sebuah properti di Kota Surabaya senilai Rp1,4 miliar.

Ia juga melaporkan kepemilikan kendaraan senilai Rp1,28 miliar, termasuk Toyota Alphard tahun 2023 dan Honda HR-V tahun 2024, serta kas dan setara kas sebesar Rp9,1 miliar.

Setelah penangkapan, proses hukum langsung berjalan. Tim KPK membawa sejumlah pihak yang diamankan ke Markas Komando (Mako) Brimob Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan awal. Seusai pemeriksaan, sebagian dari mereka diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Budi Prasetyo menjelaskan proses tersebut.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian 7 orang di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat," terang Budi.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan uang oleh bupati terkait proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ucap Budi.

Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti. "Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta dan

juga beberapa dokumen terkait," ujar Budi.

Pasca-OTT, tim KPK melakukan penyegelan sejumlah ruangan di kompleks Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti. Ruangan yang disegel meliputi ruang kerja Bupati Lombok Barat, ruang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Mendagrj Ingatkan soal Mawas Diri

Maraknya kepala daerah yang terjerat OTT dalam waktu berdekatan mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menjadikan kasus tersebut sebagai peringatan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

"Saya berharap dengan adanya OTT, OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).

Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari pembinaan integritas hingga penguatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, menurutnya, pelanggaran masih terjadi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski kepala daerahnya terjaring OTT. Pemkab menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami serahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum. Pemerintah daerah berkomitmen agar seluruh pelayanan terhadap masyarakat di setiap instansi tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada gangguan," jelas pihak internal Pemkab Lombok Barat saat memberikan keterangan pers di Mataram.

Hingga naskah ini ditulis, status hukum Lalu Ahmad Zaini dan pihak-pihak yang diamankan masih sebagai terduga. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam sejak mengamankan para pihak untuk menentukan status hukum mereka dan mengumumkan konstruksi perkara secara resmi. (wid,rls,ini,kum/dya)

Lanjutan dari Hal 1....

**DAFTAR KEPALA DAERAH
TERJARING OTT KPK**



Maidi

- **Jabatan:** Wali Kota Madiun
- **Waktu OTT:** Januari 2026
- **Dugaan perkara:** Pemerasan, penerimaan fee proyek infrastruktur, dan penyalahgunaan dana CSR.



Sudewo

- **Jabatan:** Bupati Pati
- **Waktu OTT:** Januari 2026
- **Dugaan perkara:** Pemerasan dan pungutan liar dalam pengisian jabatan perangkat desa oleh tim suksesnya.



Fadiah Arafik

- **Jabatan:** Bupati Pekalongan
- **Waktu OTT:** Maret 2026
- **Dugaan perkara:** Korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengaturan vendor di Pemkab Pekalongan.



Muhammad Fikri Thobari

- **Jabatan:** Bupati Rejang Lebong
- **Waktu OTT:** Maret 2026
- **Dugaan perkara:** Suap ijon dan commitment fee dengan pihak swasta terkait pengaturan pemenang tender proyek.



Syamsul Auliya Rachman

- **Jabatan:** Bupati Cilacap
- **Waktu OTT:** Maret 2026
- **Dugaan perkara:** Pemerasan dan setoran wajib dari SKPD/Organisasi Perangkat Daerah untuk dana THR.



Gatut Sunu Wibowo

- **Jabatan:** Bupati Tulungagung
- **Waktu OTT:** April 2026
- **Dugaan perkara:** Pemerasan, tekanan anggaran ke OPD, serta pengondisian proyek daerah.



Edison

- **Jabatan:** Bupati Muara Enim
- **Waktu OTT:** Juni 2026
- **Dugaan perkara:** Penerimaan suap/hadiah oleh penyelenggara negara terkait proyek pengadaan barang dan jasa.



Suhardiman Amby

- **Jabatan:** Bupati Kuantan Singingi
- **Waktu OTT:** Juni 2026
- **Dugaan perkara:** Suap pengondisian lelang jabatan untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda).



BAHTIYAR RIFAI:

CAMAT DAN LURAH HARUS PUNYA HOTLINE ADUAN WARGA

SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menyambut positif instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD), mulai kepala dinas hingga camat, dan lurah membuat hotline khusus. Langkah ini tentu saja untuk memudahkan masyarakat membuat aduan.

Menurut Bahtiyar, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Ini langkah yang bagus. Pak Wali Kota sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki hotline," kata Bahtiyar ketika dihubungi Lentera, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti sampah, parkir, hingga layanan publik lainnya, membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas instansi. Sehingga keberadaan hotline dinilai dapat mempermudah warga menyampaikan keluhan sekaligus mempercepat proses penanganan.

Bahtiyar mencontohkan, ketika ada laporan terkait persoalan sampah, warga dapat menyampaikannya kepada lurah setempat. Selanjutnya, pihak kelurahan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun instansi terkait untuk mencari solusi.

Begitu pula dengan persoalan parkir yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, dinas-dinas teknis juga perlu memiliki saluran pengaduan yang dapat diakses warga.

"Agar nantinya lurah, camat, maupun OPD terkait bisa turun bersama-sama menangani persoalan yang ada," ujarnya.

Terintegrasi dengan Wali Kota

Politikus Partai Gerindra itu juga berharap sistem hotline yang dibangun di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat terintegrasi dengan hotline milik Wali Kota Surabaya. Dengan demikian, kepala daerah dapat memantau langsung kinerja aparat di lapangan.

"Hotline ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang

belum merespons. Dari situ nantinya bisa dilakukan evaluasi," tuturnya.

Terkait target penyelesaian aduan, Bahtiyar menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah. Menurutnya, setiap laporan yang masuk harus segera ditelaah untuk menentukan apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan di tingkat kelurahan atau membutuhkan keterlibatan OPD terkait.

"Kalau persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tentu harus bergerak cepat. Tetapi jika membutuhkan keterlibatan OPD, maka kolaborasi antara lurah, camat, dan kepala dinas harus diutamakan," tuturnya.

DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya tidak hanya memperluas layanan hotline pengaduan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi juga menetapkan target waktu penyelesaian bagi setiap laporan warga. Kepastian waktu dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana tindak lanjut atas aduan yang mereka sampaikan.

Bahtiyar mengatakan, perluasan hotline hingga camat dan lurah merupakan langkah positif untuk mempercepat pelayanan publik. Namun, efektivitas layanan tersebut tidak cukup diukur dari cepatnya laporan diterima, melainkan dari kepastian penanganan hingga persoalan warga benar-benar selesai.

Ditegaskan, setiap aduan harus disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas, termasuk estimasi waktu penyelesaiannya. Dengan begitu, masyarakat tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

"Dengan begitu, masyarakat mengetahui tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Jadi harus ada estimasi waktu penyelesaian," kata Bahtiyar.

Ia menilai, keberadaan target waktu akan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik sekaligus menjadi tolok ukur kinerja perangkat daerah dalam menangani setiap keluhan masyarakat.

Di sisi lain, Bahtiyar menyoroti masih adanya sejumlah laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara optimal sehingga akhirnya harus mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurutnya, Eri telah memberikan

teladan yang baik dengan turun langsung ke lapangan dan merespons berbagai keluhan warga. Karena itu, seluruh aparat sipil negara (ASN), mulai dari OPD, camat, hingga lurah, harus menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

"Pak Wali Kota sudah berkali-kali mengingatkan bahwa ASN adalah abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan terbaik. Semua aduan harus ditelaah dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Bahtiyar juga menyinggung maraknya praktik pungutan liar yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai, aturan dan larangan terkait praktik tersebut sebenarnya sudah jelas. Artinya, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian aparat untuk menegakkannya.

"OPD, camat, dan lurah sekarang sudah mendapat dukungan penuh dari Wali Kota. Tidak perlu ragu atau takut selama yang dilakukan benar dan sesuai aturan. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, saya yakin warga akan mendukung," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, hotline camat, lurah, dan kepala dinas itu nantinya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Mulai persoalan parkir liar, pungutan liar, premanisme, hingga pemanfaatan aset yang tidak sesuai peraturan.

Disebut, selama ini Eri menyayangkan ada sejumlah aduan yang dilaporkan kepada jajaran PD, camat, hingga lurah namun tidak segera ditindaklanjuti. Dengan adanya temuan tersebut, Eri khawatir, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi di lingkungan Pemkot Surabaya ke depannya.

Eri berharap, hotline Kepala PD ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi Pemkot Surabaya ke depannya. Dengan demikian maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Hal ini juga sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, yakni ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) dapat terwujud di Kota Surabaya.

"Saya harap hari ini muncul keberanian-keberanian dalam diri sebagai pemerintah yang melindungi masyarakatnya, dan kita sebagai pemerintah program ASRI tidak boleh hanya sebagai slogan di Surabaya, tetapi kita buktikan, kita jalankan, itu yang harus kita jalankan dan buktikan," ujar Eri. (advama/dya)



OPD, camat, dan lurah sekarang sudah mendapat dukungan penuh dari Wali Kota. Tidak perlu ragu atau takut selama yang dilakukan benar dan sesuai aturan. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, saya yakin warga akan mendukung.

Bahtiyar Rifai

Wakil Ketua
DPRD Kota Surabaya

